

Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan

Dumilah Ayuningtyas
Universitas Indonesia

dumilah@gmail.com

Abstract

Based on data from Indonesia Corruption Watch (ICW) in 2018, health sector corruption cases caused state losses of Rp 3.7 billion. This study aims to measure corruption knowledge and the urgency of anti-corruption education in Faculty of Public Health University of Indonesia (FKM UI). A quick survey was conducted on 198 students, in addition to interviews with experts. The results of the study showed that knowledge about corruption was still low at 64.64 %. There is full support of students (100%) of the importance of anti-corruption education and also from all experts. The support of integration of anti-corruption education with curriculum is delivered by 92, 4% respondent. The discussion, case studies and role-play became the most proposed on learning methods. The low knowledge of anti-corruption reinforces the urgency of anti-corruption education integrated with curriculum. Campus has the opportunity with the availability of expertise and support of infrastructure, in addition to the challenges of adjusting the curriculum.

Keywords: *Corruption, Anti-Corruption Education, Curriculum Integration, Health Sector*

Abstrak

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch tahun 2018, kasus korupsi sektor kesehatan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar. Penelitian ini bertujuan mengukur pengetahuan korupsi dan urgensi pendidikan antikorupsi di sektor kesehatan, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Penelitian dengan *quick survei* terhadap 198 mahasiswa (sarjana 75 orang atau 37,98%) dan S2 123 orang atau 62,12%), dan terhadap pakar. Hasil studi memperlihatkan rendahnya pengetahuan tentang korupsi pada 128 orang (64,64%) dan pengetahuan cukup 70 orang (35,35%). Terdapat dukungan penuh mahasiswa (198 orang, 100%) dan seluruh pakar terhadap pentingnya pendidikan antikorupsi. Dukungan integrasi pendidikan antikorupsi dengan kurikulum formal disampaikan oleh 183 mahasiswa (92,4%), demikian halnya pandangan para pakar. Pelaksanaan diskusi (66,7%) dan studi kasus (21,3%) menjadi usulan terbanyak tentang metode pembelajaran, selain bermain peran. Masih rendahnya pengetahuan tentang antikorupsi menguatkan usulan urgensi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan kurikulum formal. Kampus memiliki peluang untuk menerapkannya dengan ketersediaan kepakaran dan dukungan sarana prasarana, selain adanya tantangan penyesuaian kurikulum formal.

Kata Kunci: Korupsi, Pendidikan Antikorupsi, Integrasi Kurikulum, Sektor Kesehatan

Pendahuluan

Kasus korupsi terjadi di berbagai sektor, salah satunya kesehatan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2018 didapatkan tren korupsi di sektor kesehatan selama tahun 2010-2018 sebanyak 220 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar. Kementerian Kesehatan menjadi salah satu dari lima lembaga/kementerian yang mendapatkan jatah Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) terbesar. Dana dalam jumlah besar yang digelontorkan oleh pemerintah membuka peluang besarnya kasus penyalahgunaan terhadap dana tersebut. Besarnya anggaran kesehatan mengakibatkan peluang untuk korupsi di sektor kesehatan terbuka lebar terutama melalui program-program kerja yang dilaksanakan seperti program pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, program penanggulangan dan pencegahan penyakit dan program-program kesehatan lainnya.

Tindak pidana korupsi di sektor kesehatan melibatkan banyak oknum pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah. Beberapa kasus korupsi juga menyangkut pejabat tinggi pemerintah antara lain seperti yang dialami mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari yang divonis empat tahun penjara dan membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Beliau divonis terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan. (Kompas, 16/6/2017). Kasus lain terjadi di tingkat pejabat dinas kesehatan lokal, yaitu dr. Laode Budiono MPH, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes atas dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2009/2010 senilai Rp 150 juta. Dana Jamkesmas senilai Rp 150 juta tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Laode yang juga mantan Direktur RSUD Brebes ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Brebes (Kompasiana, 19/10/2011). Kedua kasus ini menunjukkan bahwa korupsi dana kesehatan terjadi pada pejabat tingkat pusat maupun daerah.

Keperihatinan akan situasi tersebut dapat meningkat dengan adanya perubahan pada pembiayaan kesehatan daerah tahun 2017 dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadi Jaminan Kesehatan Nasional yang pengelolaan pembiayaannya bersumber dari pusat namun dananya diserahkan kepada pemerintah daerah. Perubahan pembiayaan kesehatan ini menuntut komitmen dan tanggung jawab pemerintah terutama pemimpin daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di sektor kesehatan. Pada dasarnya semua komponen masyarakat bertanggung jawab untuk ikut serta dalam penyelesaian berbagai masalah yang melanda bangsa Indonesia, akan tetapi, sosok yang paling bertanggung jawab dan harus berperan aktif adalah pemimpin bangsa (Haikal, 2014). Kegagalan para pemimpin dalam memimpin bangsa yang disebabkan ketidakjujuran (integritas) seorang pemimpin dalam memimpin bangsanya merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri dan rakyat banyak. Oleh karenanya diperlukan pemimpin yang mempunyai integritas yang tinggi meliputi kejujuran, kredibilitas dan ketulusan.

Pembentukan karakter pemimpin yang memiliki integritas sangat dipengaruhi oleh lembaga pendidikan yang menjadi penghasil sumber daya manusia. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) sebagai

salah satu lembaga pendidikan yang menghasilkan generasi penerus bangsa diharapkan dapat membentuk karakter yang kuat pada mahasiswanya. Hal ini sejalan dengan salah satu misi FKM UI yaitu menjadi pusat pengembangan watak, moral, etika, dan budaya bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada pengembangan integritas, wawasan, intelektualitas, profesionalisme, dan kepekaan sosial lulusan.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dan pengintegrasian di lingkungan pendidikan menjadi sangat penting dan mendesak untuk mencegah dan menanggulangi bahaya korupsi. Adanya pro dan kontra akan pentingnya pendidikan antikorupsi menjadi salah satu mata kuliah formal dalam institusi pendidikan menjadi salah satu alasan menganalisis apakah FKM UI perlu untuk memasukkan pendidikan antikorupsi ini menjadi mata kuliah khusus atau cukup hanya menjadi bagian dari beberapa mata kuliah yang sudah diterapkan sebelumnya. Untuk itu penelitian dilakukan di FKM UI dengan tujuan mengukur sejauh mana pengetahuan tentang korupsi pada mahasiswa FKM UI, memperoleh informasi mendalam tentang dukungan dan penolakan dosen serta memperoleh usulan konten kurikulum antikorupsi di FKM UI.

Tinjauan Teori

Pengertian korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikategorikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kurikulum Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu perspektif keilmuan yang berangkat dari fenomena permasalahan riil serta pendekatan budaya sebagai alternatif solusi pembelajaran akan lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) setiap individu mahasiswa. Tujuan dari matakuliah antikorupsi adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain kurikulum pendidikan antikorupsi, integritas merupakan suatu bentuk kualitas yang meliputi kejujuran, kredibilitas, dan ketulusan. Dalam konteks kepemimpinan, integritas terwujud dalam bagaimana seorang pemimpin berbicara, mengarahkan, dan bereaksi terhadap pengikutnya dan lingkungannya. Dalam mengasah kemampuan memimpin dengan integritas membutuhkan pengembangan kesadaran diri, kemampuan berpegang teguh pada kode etik atau moral dan melakukan praktik komunikasi secara jujur, terlepas seberapa sulit dan

kompleksnya masalah yang dihadapi ataupun konsekuensi negatif yang harus ditanggungnya.

Pengintegrasian pendidikan karakter dalam perkuliahan memerlukan model pembelajaran untuk mengkonstruksi penanaman nilai atau karakter yang diharapkan. Fogarty (Winarni,2013) mengemukakan bahwa terdapat sepuluh model pembelajaran terpadu, namun dapat diklasifikasikan menjadi tiga model, yaitu sebagai berikut.

1. Interdisiplin ilmu; yang termasuk tipe ini adalah model tergambar (*the fragmented model*), model terhubung (*the connected model*), dan model tersarang (*the nested model*).
2. Antardisiplin ilmu; yang termasuk tipe ini adalah model terurut (*sequenced model*), model terkombinasi (*shared model*), model terjaring laba-laba (*webbed*), model terantai (*threaded*), dan model keterpaduan (*integrated*).
3. Inter dan antardisiplin ilmu; yang termasuk tipe ini model terbenam (*immersed*) dan model jaringan kerja (*networked*).

Pelaksanaan pendidikan karakter terintegrasi dalam proses pembelajaran meliputi proses penyusunan silabus, penyusunan RPP, penyiapan bahan ajar dan media, implementasi di kelas, penilaian, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan model keterpaduan (*integrated*) karena mengacu pada Permenristek Dikti RI Nomor 44 tahun 2015, pelaksanaan pembelajaran mata kuliah dapat dilakukan dengan beberapa model antara lain diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat

secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode Penelitian

Lingkup studi ini merupakan studi deskriptif dan diperdalam dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Studi ini bermaksud mengukur pengetahuan tentang korupsi, gerakan antikorupsi, mendapatkan pandangan urgensi tentang pendidikan formal antikorupsi dan menyusun metode kurikulum dan rekomendasi untuk pengayaan di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara mendalam, kuesioner survei cepat secara *online* serta *checklist* dokumen. Berdasarkan syarat-syarat kecukupan (*adequacy*), kesesuaian (*appropriateness*) dan tidak ada lagi informasi baru, peneliti memilih informan dengan mempertimbangkan subjek yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Given, 2008).

Populasi dalam *quick survey* yang dilakukan adalah mahasiswa FKM UI dengan kriteria inklusi mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang masih aktif pada saat penelitian dilakukan. Berdasarkan rumus Lemeshow, maka jumlah sampel yang diambil sebanyak 96 mahasiswa. Menurut Ariawan (1998) menyatakan jumlah sampel yang didapat ditambahkan 10% dari jumlah sampel untuk mengantisipasi adanya kemungkinan data yang kurang sehingga jumlah sampel secara keseluruhan adalah 105 mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Pelaksanaan studi diawali dengan *desk study* untuk penyiapan kuesioner dan pedoman wawancara mendalam, kemudian dilakukan pengumpulan data *Quick survey*, dan wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Studi ini dilakukan dengan

memperhatikan aspek etika dalam penelitian dan penulisan ilmiah sejak awal penyusunan proposal dengan pencantuman berbagai referensi yang digunakan sebagai rujukan, penyiapan perizinan dalam pengambilan data dan wawancara serta survei, persetujuan setelah penjelasan penelitian dengan *informed consent*, dan telah lolos kaji etik dengan nomor 74/UN2.F10/PPM.00.02/2017. Prinsip-prinsip etik ilmiah yang berangkat dari penghormatan terhadap

HAM seperti *Beneficens Maleficent Justice* dan *Equity* diterapkan pada studi ini.

Pembahasan

Gambaran Karakteristik Responden

Gambaran karakteristik responden yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagaimana **Tabel 1** berikut.

Tabel 1. Gambaran Karakteristik Responden

Identitas Responden		N	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	48	24,24
	Perempuan	150	75,76
	Total	198	100
Jenjang Pendidikan	S1	75	37,98
	S2	123	62,12
	Total	198	100
Asal Daerah	Aceh	1	0.5
	Bali	24	12.1
	Banten	11	5.6
	Bekasi	2	1.0
	Bengkulu	2	1.0
	DKI Jakarta	29	14.6
	Jakarta	1	0.5
	Jambi	20	10.1
	Jawa Barat	35	17.7
	Jawa Tengah	8	4.0
	Jawa Timur	5	2.5
	Kalimantan Barat	8	4.0
	Lampung	6	3.0
	NTB	5	2.5
	NTT	2	1.0
	Papua	2	1.0
	Riau	16	8.1
	Sulawesi Barat	1	0.5
	Sumatera Barat	3	1.5
	Sumatera Selatan	5	2.5
	Sumatera Utara	12	6.1
	Total	198	100.0

Berdasarkan jenis kelamin didapatkan laki-laki sebanyak 48 orang (24,24%) dan perempuan sebanyak 150 orang (75,76%). Berdasarkan jenjang pendidikan diperoleh pendidikan S1

sebanyak 75 orang (37,98%) dan S2 sebanyak 123 orang (62,12%). Berdasarkan gambaran asal daerah mahasiswa didapatkan Jakarta menempati urutan pertama sebanyak 30 orang,

kemudian Jambi sebanyak 19 orang dan Bali sebesar 17 orang.

Pengukuran Pengetahuan tentang Korupsi, Gerakan Antikorupsi atau Upaya Pencegahan di Sektor Kesehatan

Berdasarkan gambaran pengetahuan secara keseluruhan pada **Tabel 2** didapatkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan kurang tentang korupsi sebanyak 128 orang (64,64%) dan mahasiswa yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 70 orang (35,35%). Berdasarkan studi ini baik kuesioner pengisian manual maupun kuesioner *online* secara keseluruhan gambaran pengetahuan didapatkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan kurang tentang korupsi sebanyak 128 orang (64,64%) dan mahasiswa yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 70 orang (35,35%). Hal

ini sesuai dengan (ITB news, 2010) penyebab terjadinya korupsi pada masyarakat adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang korupsi. Selain itu, berdasarkan Laporan Ringkas Survei Perilaku Antikorupsi tahun 2012 menyatakan bahwa sebesar 38 persen menunjukkan bahwa sedikitnya sepertiga responden tidak/belum tahu perilaku korupsi. Menurut (PGRI Jateng, 2016) Pendidikan antikorupsi mengintegrasikan domain pengetahuan (kognitif), sikap serta perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Nilai-nilai pendidikan antikorupsi harus ditanamkan, dihayati, diamalkan setiap insan Indonesia sejak dini bila perlu *long life education*, artinya nilai-nilai pendidikan antikorupsi menjadi nafas di setiap waktu, setiap tempat semasa masih hidup.

Tabel 2. Gambaran Tingkat Pengetahuan Responden

Kategori Pengetahuan	N	%
Pengetahuan kurang	128	64,64
Pengetahuan cukup	70	35,35
Total	198	100

Tabel 3. Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di FKM UI

Pentingnya Pendidikan antikorupsi	N	%
Kurang Pentingnya pendidikan antikorupsi	0	0
Pentingnya pendidikan antikorupsi	198	100
Total	198	100

Dukungan dan Penolakan Dosen, Mahasiswa, dan Pimpinan FKM UI tentang Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Di FKM UI

1. Dukungan dan Penolakan Mahasiswa tentang Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di FKM UI.

Tabel 3 di atas secara keseluruhan menjelaskan bahwa sebanyak 198 orang (100%) menyatakan bahwa penting pendidikan antikorupsi di

FKM UI dan meyakini bahwa pendidikan antikorupsi sangat penting karena tindakan korupsi dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti terhambatnya pembangunan nasional dan hancurnya perekonomian sehingga menyengsarakan masyarakat (PGRI, Jateng 2016).

Efek konkretnya adalah memperparah kemiskinan, pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi mahal, fasilitas umum seperti transportasi menjadi tidak aman serta rusaknya infrastruktur jalan, dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran hingga mengakibatkan angka kriminalitas pun meningkat. Korupsi juga memperburuk citra bangsa Indonesia di mata internasional. Pentingnya pendidikan antikorupsi juga sesuai dengan penelitian (Nafi, 2009) yang menyatakan bahwa salah satu cara dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi adalah melalui langkah preventif

(pencegahan) dengan penyemaian bibit-bibit antikorupsi melalui jalur pendidikan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi akan melahirkan generasi antikorupsi di masa yang akan datang.

2. Dukungan dan Penolakan Dosen dan Pimpinan FKM UI Tentang Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di FKM UI.

Berdasarkan hasil wawancara para pakar didapatkan semua pakar menyetujui bahwa pendidikan antikorupsi penting dilakukan karena menanamkan nilai-nilai (*value*) yang dapat mencegah seseorang untuk masuk ke dalam korupsi. Hal ini bisa terlihat dari matriks sebagai berikut.

Tabel 4. Dukungan dan Penolakan Dosen dan Pimpinan FKM UI tentang Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di FKM UI

No	Nama Pakar	Dukungan			Alasan
		Mendukung	Menolak	Netral	
1	Pakar A	√			Penting pendidikan antikorupsi terutama bila yang menjadi perhatian adalah faktor kesehatan karena memberikan dampak langsung kepada manusia
2	Pakar B	√			Sangat penting pendidikan antikorupsi sebaiknya sejak S1 agar menghasilkan kekhususan dari segi integritas
3	Pakar C	√			Penting pendidikan antikorupsi. Untuk adanya pendidikan antikorupsi dimulai dari value keluarga
4	Pakar D	√			Penting pendidikan antikorupsi namun Dosen belum melihat pendidikan antikorupsi yang mengajarkan <i>value</i> .
5	Pakar E	√			Penting pendidikan antikorupsi ditambahkan dengan pendidikan agama untuk menumbuhkan rasa takut pada Tuhan bergeser kepada jadi lebih takut pada sistem informasi
6	Pakar F	√			Pendidikan antikorupsi penting karena pendidikan antikorupsi untuk pemahaman mana yang korupsi mana yang bukan korupsi

Pimpinan FKM UI juga menyatakan bahwa pentingnya pendidikan antikorupsi. Hal ini menguatkan pandangan para pakar yang menyetujui pentingnya pendidikan antikorupsi. Hal ini sesuai pula dengan penelitian (Manurung, 2012) tentang

pentingnya pendidikan antikorupsi karena sejalan dengan pendidikan yang berkarakter dan humanistik. Selain menjadi pendidikan antikorupsi bahkan dapat juga menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak. Mahasiswa didik, pendidikan antikorupsi dan humanistik

diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam pembentukan jati diri yang jujur dan berparadigma Pancasila serta UUD 1945 sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pandangan/Persetujuan terhadap Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Kurikulum Pembelajaran

1. Pandangan/Persetujuan Mahasiswa terhadap Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Kurikulum Pembelajaran.

Berdasarkan pandangan/persetujuan terhadap integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pembelajaran secara keseluruhan didapatkan mahasiswa yang tidak setuju sebanyak 15 orang (7,6%) dan mahasiswa yang setuju sebanyak 183 orang (92,40%). Mahasiswa yang menyatakan setuju adanya integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pembelajaran sebanyak 183 orang (92,40%) dan mahasiswa yang tidak

setuju adanya integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pembelajaran sebanyak 15 orang (7,6%).

Integrasi pendidikan antikorupsi dengan kurikulum formal ini bertujuan untuk mencetak generasi yang menjunjung tinggi etika dan berperan aktif dalam menyebarkan “virus” antikorupsi di seluruh Indonesia. Integrasi pendidikan antikorupsi dengan kurikulum pembelajaran juga dinyatakan oleh pimpinan KPK pada berita *online* (Republika, 2012) yang menyatakan bahwa dunia pendidikan, mulai jenjang paling bawah hingga perguruan tinggi, menjadi salah satu fokus KPK dalam rangka pemberantasan korupsi.

Tabel 6 menggambarkan pandangan terhadap perlunya menanamkan sikap antikorupsi sejak dini guna mencegah terjadinya korupsi. Hal ini sesuai dengan (Cakrawala, 2015) pendidikan antikorupsi berguna untuk menanamkan semangat antikorupsi pada setiap anak bangsa.

Tabel 5. Dukungan dan Penolakan Dosen dan Pimpinan FKM UI tentang Pentingnya Pendidikan Antikorupsi di FKM UI

Kurikulum Pembelajaran	N	%
Tidak Setuju	15	7,60
Setuju	183	92,40
Total	198	100

Tabel 6. Alasan Menyetujui Kurikulum Pembelajaran Pendidikan dan Integritas Kepemimpinan Antikorupsi

Alasan Menyetujui Kurikulum Pembelajaran Pendidikan dan Integritas Kepemimpinan Antikorupsi		
Kurikulum Pembelajaran	N	%
Pengisian Manual		
Anti korupsi mencakup multi disiplin ilmu	5	4.0
Banyaknya kebutuhan/kepentingan masyarakat yang harus dibenahi	1	0.8
Data kesehatan bila di politisasi dapat menutup kesejahteraan sebagian kecil tertutup	1	0.8
Korupsi memiskinkan masyarakat dan menghambat pembangunan	1	0.8
Lulusan FKM akan terjun ke masyarakat dan diharapkan menjadi role of model dari kejujuran	1	0.8
Menanamkan sikap anti korupsi sejak dini	58	46.4
Menciptakan generasi penerus yang memiliki paradigma anti korupsi dari berbagai aspek	1	0.8

Integrasi Kurikulum Antikorupsi di FKM UI: Peluang dan Tantangan

Menciptakan Indonesia bebas korupsi	1	0.8
Pembentuk moral dan penguat agar tidak korupsi	1	0.8
Pendidikan anti korupsi di semua tingkat atau level sangat diperlukan	1	0.8
Sektor kesehatan juga banyak korupsi	2	1.6
Tambahan ilmu pengetahuan agar saat bekerja tidak terjerumus korupsi	32	25.6
Tidak hanya di FKM saja tetapi semua fakultas dibekali pendidikan anti korupsi	3	2.4
Tindak korupsi menurut saya merupakan kejahatan moral dan etika	1	0.8
untuk memperbaiki sistem dimana korupsi seperti sistem yang sudah mengakar	2	1.6
untuk menanamkan rasa malu dan meningkatkan moral terkait korupsi	1	0.8
Untuk mencegah makin banyaknya praktik korupsi di indonesia	1	0.8
Total	113	100.0

Pengisian Online

Belum banyak sosialisasi formal yg dilakukan ke instansi baik swasta maupun pemerintah	7	10.0
Karena menurut saya saat ini indonesia sudah darurat korupsi	10	14.3
Memberikan pengetahuan tentang korupsi & menanamkan budaya sadar antikorupsi	16	22.9
Menurunkan angka korupsi kedepannya	8	11.4
Pendidikan antikorupsi penting agar terhindar dari korupsi	21	30.0
Untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan budaya kerja	7	10.0
Untuk meningkatkan pemahaman dan ikut mencegah terjadinya korupsi	1	1.4
Total	70	100.0

Alasan Menyetujui Kurikulum Pembelajaran Pendidikan dan Integritas Kepemimpinan Antikorupsi

Kuesioner Pengisian Manual

bisa dengan mengikuti komunitas anti korupsi	1	8.3
bisa dijelaskan dengan mata kuliah lainnya	1	8.3
fakultas yang mestinya lebih terjun kepada masyarakat	1	8.3
menambah beban sks yang sudah berlebih	3	25.0
moral ditanamkan dari kecil sejak dari usia dini	1	8.3
seharusnya pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan moral	2	16.7
sksnya sudah banyak	1	8.3
sudah mendapat mata kuliah di D3	2	16.7
Total	12	100.0

Kuesioner Online

karena korupsi timbul dari hati dan niat seseorang	1	33,3
Tidak dimasukkan kedalam kurikulum baru namun masuk kedalam matakuliah yang sudah ada	2	66,7
Total	3	100

Adapun alasan mengapa sebagian responden tidak menyetujui kurikulum pendidikan antikorupsi adalah kekhawatiran akan menambah beban SKS yang sudah berlebih (sebanyak 25%). Mereka memilih untuk dimasukkan saja nilai-nilai pendidikan antikorupsi ke dalam mata kuliah yang sudah ada. Hal ini

dikarenakan pendidikan antikorupsi merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan dari lingkungan keluarga sehingga bila ditanamkan untuk mahasiswa sudah tidak efektif.

2. Pandangan/Persetujuan Dosen terhadap Integrasi Pendidikan

Antikorupsi pada Kurikulum Pembelajaran.

Pandangan/persetujuan dosen terhadap integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pembelajaran. Pada studi ini, pandangan/persetujuan dosen terhadap integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pembelajaran dapat terlihat dalam matriks pada **Tabel 7**.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam didapatkan dari enam pakar yang diwawancarai, satu diantaranya

tidak menyetujui adanya integrasi pendidikan anti korupsi dengan kurikulum pembelajaran di FKM UI. Hal ini dikarenakan untuk mahasiswa S1 sudah ada MPKT sedangkan untuk mahasiswa S2 sudah tidak efektif melakukan pembelajaran tersebut karena pendidikan antikorupsi merupakan penanaman nilai integritas yang pembentukannya tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat.

Tabel 7. Pandangan/Persetujuan Dosen terhadap Integrasi Pendidikan Antikorupsi Pada Kurikulum Pembelajaran

	Nama Pakar	Pandangan/ Persetujuan			Alasan
		Mendukung	Menolak	Netral	
1	Pakar A	√			Untuk mata kuliah antikorupsi dalam SNPT sebetulnya sudah ada melalui MPKT. Untuk mahasiswa S1 dalam MPKT, mahasiswa S2 dan S3 tidak ada mata kuliah wajib universitas, design kurikulum mengarah kompetensi dan teknis
2	Pakar B	√			sangat perlu sebaiknya sejak S1 agar menghasilkan kekhususan dari segi integritas
3	Pakar C		√		Pendidikan antikorupsi (value) dari keluarga untuk S1 ditambah dengan adanya mata kuliah MPKT sedangkan untuk S2 sudah tidak efektif karena untuk adanya pendidikan antikorupsi diperlukan pembentukan integritas.
4	Pakar D	√			Pada mahasiswa S1 sudah ada MPKT A namun pada S2 dan S3 tidak ada
5	Pakar E	√			Untuk mahasiswa S1 sudah ada MPKT namun S2 dan S3 belum ada
6	Pakar F	√			Penerapan kurikulum bisa untuk mahasiswa S1 untuk menghasilkan role model, sedangkan S2 belum ada.

Tabel 8. Pandangan Metode Pembelajaran di FKM UI

Kuesioner Pengisian Manual			Kuesioner Online		
Metode Pembelajaran	N	%	Metode Pembelajaran	N	%
Masuk dalam P4 mahasiswa baru	1	0.9			
Digabungkan dengan hal tata kelola/kebijakan publik masyarakat	1	0.9			
Diskusi	25	22.1	Diskusi	23	32.8
FGD	1	0.9	FGD	2	2.9
Kuliah umum	19	16.8	Kuliah umum	11	15.7
Kunjungan lapangan	5	4.4			

Masuk kurikulum wajib	4	3.5			
memasukan konten agama yang berkaitan dengan korupsi	3	2.7			
Metode CBL	1	0.9			
Metode pembelajaran yang aktif	1	0.9	Role model	6	8.6
PBL	2	1.8	Observasi lapangan	9	12.9
Roleplay	18	15.9	Role play	3	4.3
SLC	1	0.9			
student active learning	1	0.9			
Studi kasus	24	21.3	Studi kasus	16	22.9
tatap muka langsung	1	0.9			
team learning	1	0.9			
tidak ada usulan	4	3.5			
Total	113	100.0	Total	70	100.0

Usulan Konten Kurikulum Antikorupsi di FKM UI

Tabel 7 menggambarkan hasil pandangan tentang usulan metode belajar, dengan usulan terbanyak adalah diskusi, studi kasus dan kuliah umum serta bermain peran (*role-play*). Hal ini juga sama seperti yang dilakukan pada salah satu universitas swasta X yang membuat metode kurikulum pendidikan antikorupsi dengan cara pengajaran di kelas, kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berdiskusi dengan para tokoh KPK, *Stadium General* dengan mengundang para tokoh dan melakukan penulisan *investigative report*, guna mengumpulkan laporan investigasi atas kasus korupsi yang mereka amati secara langsung di lapangan.

1. Rekomendasi Usulan Konten Kurikulum Berdasarkan Para Pakar

Tabel 9 menjelaskan hasil wawancara mendalam terhadap 6 pakar yang 4 diantaranya menyatakan bahwa kurikulum pendidikan antikorupsi bisa dimasukkan kedalam mata kuliah yang sudah ada di FKM UI seperti ekonomi kesehatan dan kebijakan kesehatan untuk mahasiswa S2 sedangkan untuk mahasiswa S1 terdapat mata kuliah MPKT dan adanya ekstrakurikuler yang ada pada kegiatan mahasiswa bisa dimasukkan sebagai bahan pembelajaran yang tidak harus formatif di kelas tetapi mendapatkan nilai-nilai dari pendidikan antikorupsi itu sendiri. Berdasarkan Pedoman Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dirjen Diktis Kementerian Agama RI 2016, Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi bisa menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan antikorupsi, yang masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Tabel 9. Rekomendasi Usulan Konten Kurikulum Berdasarkan Para Pakar

No	Nama Pakar	Benchmark			Alasan
		Mendukung	Menolak	Netral	
1	Pakar A	√			Menerapkan pendidikan sistem pendidikan Silat atau model pesantren yang hormat kepada guru, Perguruan tinggi di Jepang: karakter mengikuti guru.
2	Pakar B	√			untuk <i>Benchmark</i> upaya negara lain bisa ke singapore dan jepang namun bisa juga hongkong karena hongkong membuat institusi seperti KPK juga di negaranya

3	Pakar C	√	Harus ada role model seperti italia dan china
4	Pakar D	√	Benchmark bisa di jepang, italia dan Cina
5	Pakar E	√	Contohnya bisa lihat di jepang
6	Pakar F	√	Benchmark komitmen dalam pemerintah: Cina, Korea, Jepang.

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Bila kita melakukan *benchmarking* dengan negara lain seperti Korea, dukungan dari pemerintah untuk kegiatan antikorupsi organisasi masyarakat sipil bahkan dapat mencakup dukungan keuangan. Kamboja telah melaporkan kerja sama dalam bentuk pendidikan antikorupsi di sekolah negeri, setelah sebuah survei menemukan tingkat kesadaran yang rendah tentang dampak korupsi di kalangan generasi muda. Berikut pendapat para pakar mengenai *benchmarking* pendidikan antikorupsi pada **Tabel 10**. Berdasarkan hasil wawancara mendalam didapatkan dari 6 para pakar, 4 pakar menyatakan bisa melakukan *benchmarking* ke Jepang dan 2 para pakar lainnya menyatakan bisa melakukan pembelajaran terpetik dari Hongkong, Cina, Korea dan Italia.

2. *Benchmarking* Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Cina

Pendidikan antikorupsi di Indonesia baru dicanangkan masuk ke dalam kurikulum pendidikan tahun 2019. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan KPK adalah adanya festival anak jujur yang sasarannya pelajar Sekolah Dasar (SD) dengan melakukan diskusi seputar

pendidikan antikorupsi serta menyajikan sosio drama sekolah (Tempo, 2017). Sedangkan di kalangan perguruan tinggi Kementerian Ristekdikti telah melaksanakan *training* untuk ribuan dosen dari berbagai bidang ilmu yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, serta berbagai kampus baik negeri maupun swasta yang terlibat dalam ToT (*Training of Trainer*) Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (Ristekdikti, 2008). Kita bisa belajar dari China yang memiliki *Central Commission for Discipline and Inspection*. China tentunya lebih unggul karena berhasil menerapkan penegakan hukum (*law enforcement*) tanpa pandang bulu termasuk menghukum mati para koruptor. Salah satu cara yang paling praktis dalam pendidikan antikorupsi adalah nama-nama dan gambar pejabat negara yang korup dipajang dalam sebuah pameran untuk memperlihatkan kepada publik wajah dan integritas mereka. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penyebaran berita dan informasi berbau pendidikan antikorupsi melalui media sosial. (Lidya, 2010).

Tabel 10. Kesiapan Pengintegrasian Kurikulum Antikorupsi Di FKM UI

No	Peluang
1	Ketersediaan tenaga pendidik para pakar yang juga mnjadi pengembang kebijakan dan kontributor dalam berbagai kebijakan kesehatan di Indonesia
2	Keinginan tinggi para mahasiswa untuk mendapatkan mata kuliah tersebut
3	Posisi UI sebagai universitas terbesar tertua dan otoritas untuk memutuskan konten kurikulum serta dukungan finansial, dan sarana prasarana
4	Tingginya harapan dan kebutuhan masyarakat luas dan pembuat kebijakan, terhadap lulusan UI
5	Besarnya peluang bagi lulusan FKM UI untuk menempati posisi dan jabatan kepemimpinan di sektor kesehatan

No	Tantangan
1	Beban sks yang sudah tinggi, terutama bagi mahasiswa pasacasarjana yang mayoritas sudah bekerja, waktu perkuliahan berlangsung singkat, umumnya hanya di akhir pekan.
2	Mencari model pembelajaran yang relevan dengan keberagaam mahasiswa dan menangkap dinamisnya perubahan situasi gerakan antikorupsi di Indonesia.
3	Upaya membuktikan efektivitas integrasi pendidikan antikorupsi ke kurikulum formal di Universitas, mengingat kuatnya pandangan bahwa nilai pendidikan antikorupsi adalah harus dibangun sejak dini dalam keluarga.

Analisis Situasi yang Menggambarkan Kesiapan Pengintegrasian Kurikulum Antikorupsi Di FKM UI

Kesiapan pengintegrasian kurikulum pendidikan antikorupsi digali dengan analisis tentang berbagai hal positif dari faktor internal dan eksternal yang berperan positif dan mendukung integrasi, selain hal yang masih menjadi hambatan atau tantangan untuk mewujudkannya. Analisis peluang dan tantangan diperoleh pada **Tabel 10**.

Penutup Kesimpulan

- a. Pengetahuan mahasiswa tentang pendidikan dan integritas kepemimpinan antikorupsi mayoritas masih rendah (128 orang/64,64%), sedangkan sisanya sebanyak 70 orang (35,35%) memiliki pengetahuan cukup;
- b. Keseluruhan mahasiswa yang menjadi responden menyetujui pentingnya pendidikan antikorupsi (198 orang/100%) , demikian pula secara umum pandangan pakar meski ada yang pula yang menyampaikan bahwa integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum mahasiswa S2 sudah tidak efektif;
- c. Usulan metode kurikulum terbanyak adalah diskusi sebanyak 25 orang (66,7%), studi kasus sebanyak 24 orang (21,3%), kuliah umum sebanyak 19 orang (16,8%), roleplay sebanyak 18 orang (15,9%);

- d. Masih rendahnya pengetahuan tentang antikorupsi menguatkan usulan urgensi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan kurikulum formal. FKM UI memiliki peluang untuk menerapkan dengan ketersediaan kepakaran dan dukungan sarana prasarana, selain adanya tantangan penyesuaian kurikulum formal.

Saran

- a. Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dan integrasi ke kurikulum formal perlu disegerakan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan aspek kekuatan dan kelemahan internal sebagai bagian dari kesiapan. Proses penyelenggaraannya dapat dilakukan bertahap dengan memasukkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi ke dalam perkuliahan yang telah ada, misalnya kebijakan kesehatan, ekonomi kesehatan ataupun kepemimpinan strategis dan perilaku organisasi serta manajemen SDM.
- b. Pendidikan antikorupsi dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan posisi strategis UI, ketokohan kepakaran dan daya pengaruh yang dimiliki.

Referensi

- Ariawan. (1998). *Besar dan Metode Sampel Penelitian Kesehatan*. Jurusan Biostatistik dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Bappenas. (2012). Laporan Ringkas Survei Perilaku Antikorupsi Tahun 2012. [Http://stranasppk.bappenas.go.id/upload/file_article/document/\(laporan-ringkas-survey-perilaku-antikorupsi-2012\)-NewsLetter_SPAK_2012_-_Publikasi_Indikator_Tunggal_Ringkaskas.pdf](http://stranasppk.bappenas.go.id/upload/file_article/document/(laporan-ringkas-survey-perilaku-antikorupsi-2012)-NewsLetter_SPAK_2012_-_Publikasi_Indikator_Tunggal_Ringkaskas.pdf). Diakses 23 Maret 2018.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tim Pengembang SPMI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2016). Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). [Https://bpm.umsida.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/3.-Standar-Nasional-Pendidikan-Tinggi-SN-Dikti.pdf](https://bpm.umsida.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/3.-Standar-Nasional-Pendidikan-Tinggi-SN-Dikti.pdf). Diakses 29 Maret 2019.
- Given, Lisa M. (2008). *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Method Vol 1 & 2*. Sage Publications. United States of Amerika.
- Haikal, Husain. 2014. Kepemimpinan Lokal sebagai Pilar Kepemimpinan Nasional. [Http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/410](http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/410). Diakses 25 Oktober 2017.
- https://www.kompasiana.com/youbi_fhua10/peran-strategis-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi_551b278f813311551a9de354. Diakses 21 Oktober 2017.
- ITB News. (2010). *Kuliah Umum Pendidikan Antikorupsi bersama Bibit Samad Rianto*. <https://www.itb.ac.id/news/read/2732/home/kuliah-umum-pendidikan-antikorupsi-bersama-bibit-samad-rianto>. Diakses 23 Maret 2018.
- Kementerian Kesehatan. (2014). *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK)*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi untuk Perguruan Tinggi*. Kemendikbud. Jakarta.
- Kompasiana. (2012). *Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi*.
- Lidya Christin Sinaga. (2010). *Wajah Korupsi di China*. [Http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/110](http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/110). Diakses 8 Maret 2019.
- Liputan 6. (2017). Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Dituntut 6 Tahun Penjara. [Http://news.liputan6.com/read/2973178/mantan-menteri-kesehatan-siti-fadilah-dituntut-6-tahun-penjara](http://news.liputan6.com/read/2973178/mantan-menteri-kesehatan-siti-fadilah-dituntut-6-tahun-penjara). Diakses 21 Oktober 2017.
- PGRI Jateng. (2016). Penanaman nilai-nilai antikorupsi. [Http://pgri-jateng.info/archive/read/153/penanaman-nilai-nilai--antikorupsi-di-sekolah](http://pgri-jateng.info/archive/read/153/penanaman-nilai-nilai--antikorupsi-di-sekolah). Diakses 23 Maret 2018.
- Ristekdikti. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi akan diterapkan di semua jenjang pendidikan*. [Https://ristekdikti.go.id/kabar/pendidikan-antikorupsi-akan-diterapkan-di-semua-jenjang-pendidikan-2/](https://ristekdikti.go.id/kabar/pendidikan-antikorupsi-akan-diterapkan-di-semua-jenjang-pendidikan-2/). Diakses pada 8 Maret 2019.
- Tempo. 2017. Pendidikan Antikorupsi Wajib Masuk Kurikulum Tahun 2019. <https://nasional.tempo.co/read/11>

54366/pendidikan-antikorupsi-wajib-masuk-kurikulum-mulai-2019/full&view=ok. Diakses 8 Maret 2019.

Winarni, Sri. (2010). Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Perkuliahan. *Jurnal Pendidikan Karakter FIK Universitas Negeri Yogyakarta*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1291>. Diakses pada 29 Maret 2019.